



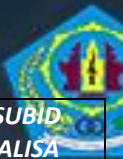
CASCADING KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

Tujuan : Peningkatan Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator : 1. Opini BPK (WTP)
2. Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan

SEKRETARIAT	KEPALA BIDANG ANGGARAN	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN	KEPALA BIDANG ASET
<p>Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi perkantoran Indikator : Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</p> <p>Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas ketersediaan sarana prasarana aparatur Indikator : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</p> <p>Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM Indikator : Persentase ASN yang mengikuti Bimtek yang lulus dengan kategori baik</p> <p>Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan Indikator : Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan</p>	<p>Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan APBD Indikator : Ketepatan waktu penyusunan APBD</p>	<p>Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penatausahaan APBD Indikator : Persentase kesesuaian penyerapan anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban APBD Indikator : Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Barang Milik Daerah Indikator : Ketepatan waktu penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator : Persentase kesesuaian pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap perencanaan pengelolaan BMD</p> <p>Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah Indikator : Ketepatan waktu penyampaian laporan Barang Milik Daerah</p>



KASUBAG PERENCANAAN, DATA, PELAPORAN DAN KEUANGAN	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KASUBID PERENCANAAN ANGGARAN	KASUBID PENATAUSAHAAN ANGGARAN	KASUBID PENGENDALIAN ANGGARAN	KASUBID KAS DAERAH	KASUBID PERBENDAHARAAN	KASUBID AKUNTANSI DAN PELAPORAN	KASUBID PENATAUSAHAAN ASET	KASUBID PEMANFAATAN ASET	KASUBID ANALISA KEBUTUHAN
<p>1. Meningkatnya kesesuaian waktu penyusunan dokumen/laporan perencanaan BPKAD</p> <p>Indikator: a. Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan BPKAD b. Jumlah RKT yang disusun tepat waktu</p> <p>2. Meningkatnya dokumen laporan keuangan BPKAD</p> <p>Indikator: Jumlah penyusunan laporan keuangan BPKAD</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip BPKAD</p> <p>Indikator: Persentase peningkatan hasil penilaian kearsipan oleh badan arsip</p> <p>2. Meningkatnya Kesesuaian Pengelolaan Surat Menyurat sesuai dengan SOP</p> <p>Indikator: Persentase kesesuaian pengelolaan surat menyurat</p>	<p>1. Tersedianya regulasi pedoman penyusunan APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Indikator: Jumlah regulasi pedoman penyusunan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>2. Terwujudnya Aparatur yang profesional dalam penyusunan anggaran</p>	<p>1. Tersedianya regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Indikator: Jumlah regulasi pedoman pengelolaan keuangan daerah</p>	<p>1. Terwujudnya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dalam penyusunan anggaran</p> <p>Indikator : Ketepatan waktu penyusunan laporan monev penyusunan anggaran</p>	<p>1. Terwujudnya monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian nilai kas umum daerah</p> <p>Indikator : Kesesuaian nilai kas daerah antara rekening koran dengan buku kas umum daerah</p>	<p>1. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Indikator: Ketepatan waktu penerbitan SP2D</p>	<p>1. Tersedianya regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Indikator : Jumlah regulasi pedoman pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah</p>	<p>1. Tersedianya regulasi tentang pedoman penatausahaan BMD sesuai Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Indikator: Jumlah regulasi pedoman penatausahaan BMD</p> <p>2. Tersedianya aparatur penatausahaan BMD yang professional</p> <p>Indikator: Jumlah SDM yang telah mengikuti Bimtek penatausahaan BMD yang terlatih</p>	<p>1. Tersedianya regulasi tentang pedoman pemanfaatan BMD sesuai Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Indikator: Jumlah regulasi pedoman pemanfaatan BMD</p> <p>2. Terwujudnya monitoring evaluasi terhadap penatausahaan BMD</p> <p>Indikator: Ketepatan waktu penyusunan laporan monev penatausahaan BMD</p>	<p>1. Tersedianya regulasi tentang pedoman penyusunan RKBMD</p> <p>Indikator : Jumlah regulasi pedoman penyusunan RKBMD</p> <p>2. Tersedianya regulasi tentang Standar Satuan Harga Barang dan Standar Biaya Jasa sesuai Peraturan Perundang-undangan</p>



- 3. Meningkatnya kualitas kendaraan operasional

Indikator: Persentase kendaraan operasional yang siap pakai
- 4. Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana perkantoran

Indikator: Persentase sarana prasarana perkantoran yang siap pakai
- 5. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur BPKAD

Indikator : Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek yang lulus dengan kategori baik

Indikator: Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek penyusunan anggaran yang terlatih

- 2. Terwujudnya aparatur (Pengelola Keuangan Daerah) yang profesional dalam pengelolaan keuangan

Indikator : Jumlah SDM yang telah mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlatih
- 3. Tersedianya sistem pelaporan keuangan yang handal

- 3. Tersedianya sistem penatausahaan BMD yang handal

Indikator: Jumlah sistem penatausahaan BMD yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan regulasi
- 4. Terwujudnya monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan BMD

Indikator: Jumlah berita acara hasil rekonsiliasi

- Indikator : Jumlah regulasi pedoman Standar Satuan Harga Barang dan Standar Biaya Jasa
- 3. Tersedianya Analisa/kajian Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Indikator : Jumlah Analisa/kajian Pemanfaatan Barang Milik Daerah



6. Meningkatnya kesesuaian waktu usulan kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang undangan –

Indikator: Persentase kesesuaian waktu usulan kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang undangan –

Indikator :
Jumlah sistem yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan regulasi

4. Terwujudnya monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan

Indikator :
Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

Denpasar, 4 Desember 2018

Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar

I Made Pasek Mandira, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661011 199503 1 001